

Anggota Komisi VIII DPR RI Monitoring Penyaluran Bansos di Kantor Pos Martapura Kabupaten Banjar



Sumber gambar

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211222071348-4-301070/deretan-bansos-yang-bakal-tetap-cair-hingga-2022>

Penyaluran bantuan sosial (bansos) BBM, Sembako dan PKH dari sumber APBN dimonitoring anggota Komisi VIII DPR RI Syaiful Rasyid.

Tempat penyaluran bansos berlangsung di Kantor Pos Martapura, Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (8/12/2022).

Syaiful Rasyid mengaku senang karena percepatan penyaluran bansos hampir 100 persen.

Itu artinya terjadi pencapaian yang maksimal.

Mantan Bupati Hulu Sungai Tengah dua periode itu meminta agar penerima bansos PKH lebih mementingkan pendidikan anak daripada keperluan lainnya.

Dalam kesempatan itu Bupati Banjar H Saldi Mansyur berterima kasih dengan perhatian anggota DPR RI sehingga melaksanakan monitoring penyaluran bansos daerah pemilihan Kabupaten Banjar.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Siti Hamidah, Manajer Kantor Pos Besar Kota Banjarbaru, Marvy M Gomies, Kepala Balai

Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan dan Kabag Humas Kementerian Sosial.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Anggota DPR RI Komisi VIII Syaiful Rasyid dan perwakilan Kementerian Sosial (Kemensos) RI Rinto Indriatmoko beserta rombongan lakukan kunjungan kerja dan monitoring penyaluran bantuan sosial ke masyarakat, di kantor pos, Jalan Pangeran Hidayatullah Martapura, Kamis (8/12/2022) pagi.

Kedatangan rombongan disambut oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur didampingi Executive Manager Kantor Pos Cabang Banjarbaru Marvy Gomes.

Bupati Banjar H Saidi Mansyur mengucapkan selamat datang dan mengapresiasi Kemensos beserta Komisi VIII DPR atas dilaksanakannya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat di Kabupaten Banjar.

” Alhamdulillah BPNT dan PKH tahap satu untuk seluruh Kecamatan di Kabupaten Banjar hampir 100 persen telah disalurkan, pada hari ini dimulainya penyaluran tahap kedua bagi masyarakat penerima manfaat,” ucapnya.

Monitoring yang dilakukan diharap Saidi dapat semakin memperbaiki layanan-layanan yang akan dilakukan selanjutnya dan mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan.

Sementara itu Anggota DPR RI Komisi VIII Syaiful Rasyid menerangkan, tujuan dilaksanakannya monitoring adalah sebagai agenda pengawasan terhadap realisasi penyaluran bantuan kepada warga yang berhak menerima bantuan dari pemerintah.

” Kami memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan untuk masyarakat penerima manfaat agar benar benar menggunakan bantuan yang diberikan untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan anak,” jelasnya.

Pihaknya juga turut mengapresiasi peran pemerintah daerah yang mampu menggerakkan roda perekonomian dan meringankan beban masyarakat di kondisi sulit seperti sekarang.

Di kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan Syaiful Rasyid kepada tiga orang perwakilan penerima.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/12/08/anggota-komisi-viii-dpr-ri-monitoring-penyaluran-bansos-di-kantor-pos-martapura-kabupaten-banjar>.
2. <https://rsb.banjarkab.go.id/penyaluran-bansos-di-kantor-pos-martapura-di-monitoring/>

Catatan:

Pengaturan mengenai Bantuan Sosial secara umum tertuang dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.
- Permendagri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran Permendagri nomor 77 tahun 2020 angka 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi huruf f. Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
 - 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 - 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
- d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.